PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

DHIVA SURYA WIRATAMA
NIM. B1011181153

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Dhiva Surya Wiratama
NIM	:	B1011181153
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 6 Januari 2025



Dhiva Surya Wiratama
NIM. B1011181153

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Dhiva Surya Wiratama
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 22 Januari 2025
Judul Tugas Akhir	:Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 6 Januari 2025
Penulis



Dhiva Surya Wiratama
NIM. B1011181153

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

DHIVA SURYA WIRATAMA
B1011181153

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 22 Januari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Metasari Kartika, S.E., M.E. NIP 198409152014042001	12/02/2025	
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. Hj, Fariastuti, S.E., M.A. NIP 196303171986032002	12/02/2025	
3.	Anggota Penguji	Rio Laksamana S.E., M.E. NIP 1110098503	11/02/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

18 FEB 2025

Pontianak,
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **"Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat"**. Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Jurusan ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Tercinta, Ayah Rudi Riyono dan Mamah Siti Khotimah, serta Adik Saya Devi Zulfa Dwitami dan juga Om Muhammad Azwir S,H. yang selalu mendoakan, mendukung, serta selalu memberikan pendidikan terbaik kepada Penulis.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. Selaku Ketua Program Studi EkonomiPembangunan Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Metasari Krtika, S.E., M.E. Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan, masukan dan nasihat kepada Penulis sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Fariastuti, S.E., M.A. Selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Rio Laksamana S.E., M.E. Selaku Dosen Penguji ke dua yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi di kampus.
9. Bapak dan Ibu Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis selama masa studi.
10. Partner selama penulisan Tugas Akhir Saya yang selalu setia menemani, meluangkan waktu untuk membantu, mendengarkan keluh kesah, Pitriani, S.E. terima kasih selalu bisa diajak diskusi dan bertukar pikiran.
11. Seluruh teman-teman IESP C 2018 yang memberikan banyak pengalaman serta cerita selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membaca Tugas Akhir ini dan Penulis berharap semoga isi dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 6 Januari 2024
Penulis



Dhiva Surya Wiratama
NIM. B1011181153

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Dhiva Surya Wiratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Sampai saat ini, kemiskinan yang dihadapi oleh negara merupakan masih jadi masalah yang serius, khususnya di negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk mencapai taraf hidup yang dianggap layak, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Dalam arti yang lebih tepat, kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mempuyai cukup uang dan barang untuk mencukupi akan kebutuhan dasar hidup mereka. Selain itu, orang miskin umumnya mengalami pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka (Kakisina, C. S. 2016). Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah kemiskinan paling tinggi dari lima provinsi di pulau Kalimantan. Besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,73% atau sebesar 356.510 jiwa. Selama periode 2018-2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat menunjukkan fluktuasi. Faktor utama yang memengaruhi kemiskinan meliputi pertumbuhan jumlah penduduk, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali meningkatkan risiko kemiskinan, meskipun beberapa daerah menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin meski jumlah penduduk meningkat. Pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah. Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Rata-rata lama sekolah meningkat, namun beberapa daerah tetap menunjukkan peningkatan kemiskinan. Anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan penting untuk mengurangi kemiskinan, meskipun fluktuasi anggaran di beberapa daerah seperti Mempawah menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diiringi penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan strategis yang mencakup pertumbuhan jumlah penduduk, pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata diperlukan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan tersebut, didapati bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018-2022 menunjukkan tingkat kemiskinan yang cenderung menurun akan

tetapi ada tahun dimana tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Kenyataan yang ada dari variabel Jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang menyebabkan kemiskinan terdapat ketidak sesuaian dengan teori yang ada, dimana pada variabel jumlah penduduk ada beberapa Kabupaten/Kota meningkat justru tingkat kemiskinan menjadi menurun. Selanjutnya pada variabel rata-rata lama sekolah ada beberapa Kabupaten/Kota dimana rata-rata lama sekolah meningkat namun kemiskinan juga ikut meningkat. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ada beberapa Kabupaten/Kota dimana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat namun kemiskinan juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat".

3. Tujuan Penelitian

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, rata rata lama sekolah dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Analisis

Penelitian ini termasuk penelitian ekplanatori yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono 2016). Selanjutnya analisis data menggunakan data panel yaitu gabungan data *time series* yang merupakan runtut waktu dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2013-2022, dan data *cross section* yaitu di wilayah 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang berjumlah 140 observasi. Data bersunber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah dan kemiskinan. Adapun pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Provinsi Kalimatan Barat didominasi oleh usia produktif yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif yang tinggi ini dapat menjadi pendorong utama dalam mendorong pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. 2.) Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena keseriusan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah guna mengurangi kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat melalui pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Ketika rata-rata lama sekolah meningkat, kualitas pendidikan pun cenderung membaik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. 3.) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena rata rata alokasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang kurang tepat sasaran yang mana lebih banyak dialokasikan untuk pengeluaran/belanja yang sifatnya konsumtif

dibandingkan dengan belanja yang sifatnya lebih produktif. Oleh karena masyarat miskin belum bisa merasakan secara langsung dampak pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan alokasi anggaran yang kurang produktif.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1.) Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 2.) Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 3.) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: 1.) Pemerintah diharapkan selalu berupaya memanfaatkan dominasi usia produktif melalui peningkatan keterampilan, serta pengembangan sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 2.) Pemerintah diharapkan selalu berupaya memperkuat kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbanyak alokasi dana BOS, guna meningkatkan rata-rata lama sekolah yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 3.) Pemerintah diharapkan perlu mengalokasikan anggaran kesehatan secara lebih tepat sasaran dengan fokus pada belanja produktif, seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan program pencegahan penyakit, agar masyarakat miskin dapat merasakan manfaat langsung dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**
RINGKASAN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK **1**
1. PENDAHULUAN **2**
2. KAJIAN LITERATUR **6**
2.1 Landasan Teori 6
2.2 Tinjauan Empiris 7
2.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan 7
2.2.2 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan 8
2.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan 8
2.3 Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian 9
2.3.1 Kerangka Konseptual 9
2.3.2 Hipotesis Penelitian 9
3. METODE PENELITIAN **10**
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 10
3.2 Metode dan Alat Analisis 10
3.3 Analisis Regresi 11
3.3.1 CEM 11
3.3.2 *FEM* 11
3.3.3 REM 11
3.3.4 Pemilihan Model Data Panel 11
3.4 Uji Asumsi Klasik 12
3.4.1 Uji Normalitas 12
3.4.2 Uji Multikolinearitas 12
3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 12
3.5 Uji Statistik 12
3.5.1 Uji t 12

3.5.2 Uji F 13
3.5.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi) 13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Hasil Penelitian 13
4.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 13
4.1.2 Uji Statistik 15
4.2 Uji Asumsi Klasik 15
4.2.1 Uji Normalitas 15
4.2.2 Uji Multikolinearitas 16
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 16
4.3 Pembahasan 17
4.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan 17
4.3.2 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan 18
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan .. 19
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 21
5.1 Simpulan 21
5.2 Rekomendasi 21
DAFTAR RUJUKAN 22
LAMPIRAN 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (persen) 2
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (jiwa) 3
Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (tahun) 4
Tabel 4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (jutaan rupiah) 5
Tabel 5. Hasil Uji Chow 13
Tabel 6. Hasil Uji Hausman 14
Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier 14
Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Random Effect Model 14
Tabel 9. Hasil Uji F 15
Tabel 10. Hasil Uji (R2) 15
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas 16
Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual 9
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 16
Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kalimantan Barat tahun 2010 dan 2020 17
Gambar 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022 (Milyar Rupiah) 18
Gambar 5. Rata-Rata Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022 (Milyar Rupiah) 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Semua Data 24
Lampiran 2. Data Logaritma 27
Lampiran 3. Uji Chow 31
Lampiran 4. Uji Hausman 31
Lampiran 5. Uji lagrange Multiplier 31
Lampiran 6. Hasil Regresi Random Effect Model (REM) 32
Lampiran 7. Uji Normalitas 32
Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas 33
Lampiran 9. Uji Multikolinearitas 33

THE INFLUENCE OF POPULATION SIZE, AVERAGE YEARS OF SCHOOLING, AND GOVERNMENT EXPENDITURE IN THE HEALTH SECTOR ON POVERTY IN REGENCIES/CITIES IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

[1]Dhiva Surya Wiratama
Faculty of Economics and Business, Tanjungpura University, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of Population Size, Average Years of Schooling, and Government Expenditure in the Health Sector on Poverty in Regencies/Cities in West Kalimantan Province. This is an explanatory study using panel data over a 10-year period from 2013 to 2022 in the regencies/cities of West Kalimantan Province. The analysis employed is multiple regression analysis with the Random Effect Model (REM), using Eviews 12. The results show that, simultaneously, the variables Population Size, Average Years of Schooling, and Government Expenditure in the Health Sector have a significant effect on Poverty in Regencies/Cities in West Kalimantan Province. Partially, it was found that Population Size has a negative and significant effect on Poverty, Average Years of Schooling has a negative and significant effect on Poverty, and Government Expenditure in the Health Sector has a negative but not significant effect on Poverty in Regencies/Cities in West Kalimantan Province.

Keywords: Poverty; Population Size; Average Years of Schooling; Government Expenditure in the Health Sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori berbentuk data panel dalam kurun waktu 10 tahun terhitung dari tahun 2013-2022 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan model regresi *Random Effect Model* (REM), menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara parsial menemukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Kemiskinan; Jumlah Penduduk; Rata-Rata Lama Sekolah; Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.

[1]dipasuryatama@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kemiskinan yang dihadapi oleh negara merupakan masih jadi masalah yang serius, khususnya di negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk mencapai taraf hidup yang dianggap layak, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Dalam arti yang lebih tepat, kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai cukup uang dan barang untuk mencukupi akan kebutuhan dasar hidup mereka. Selain itu, orang miskin umumnya mengalami pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka (Kakisina, C. S. 2016).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah kemiskinan paling tinggi dari lima provinsi di pulau Kalimantan. Besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,73% atau sebesar 356.510 jiwa. Berikut merupakan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 1.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	8,55	8,19	7,70	7,66	6,92
Bengkayang	7,17	6,96	6,62	6,48	6,03
Landak	11,77	11,47	11,12	10,99	10,01
Mempawah	5,61	5,32	4,95	5,18	5,32
Sanggau	4,67	4,57	4,46	4,55	4,51
Ketapang	10,93	10,54	10,29	10,13	9,39
Sintang	10,35	9,65	9,27	9,28	8,57
Kapuas Hulu	9,60	9,62	8,99	8,93	8,59
Sekadau	6,17	6,11	5,87	6,26	5,85
Melawi	12,83	12,38	12,04	12,01	11,44
Kayong Utara	10,08	9,98	9,56	9,33	9,04
Kubu Raya	5,07	4,74	4,42	4,34	4,12
Kota Pontianak	5,00	4,88	4,70	4,58	4,46
Kota Singkawang	5,12	4,91	4,53	4,83	4,67
Kalimantan Barat	7,77	7,49	7,17	7,15	6,73

Sumber: BPS(2023)

Tabel 1 bisa diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berfluktuasi. Terdapat 8 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Pontianak mengalami penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya. Adapun di sisi lain pada Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Kota Singkawang mengalami fluktuatif. Di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tingkat kemiskinannya masih tinggi dan tidak merata, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan strategi pemerintah dalam

memberantas kemiskinan. Namun secara keseluruhan pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan kemiskinan setiap tahun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan tantangan serius bagi kesejahteraan masyarakat dan proses pembangunan. Jika jumlah penduduk yang besar tidak didukung oleh perekonomian yang kuat, berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi nasional secara keseluruhan bisa muncul (Yacoub & Apriani 2019). Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah karena dapat menyebabkan tingginya jumlah kemiskinan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (jiwa)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	532.609	535.725	625.352	634.182	641.271
Bengkayang	251.320	255.261	285.418	289.967	294.503
Landak	372.609	377.305	396.532	402.296	407.994
Mempawah	261.299	264.225	300.759	304.781	308.804
Sanggau	463.995	470.224	483.497	490.467	497.280
Ketapang	504.008	512.783	569.238	577.188	584.946
Sintang	413.369	418.785	420.169	426.260	432.206
Kapuas Hulu	258.984	263.207	251.919	255.487	258.989
Sekadau	199.576	201.578	210.918	213.946	216.862
Melawi	205.298	208.417	227.743	231.766	235.669
Kayong Utara	110.899	112.715	126.035	128.324	130.592
Kubu Raya	570.914	579.331	607.018	617.798	628.558
Kota Pontianak	637.723	646.661	658.060	664.058	669.853
Kota Singkawang	219.061	222.910	234.163	238.193	242.177

Sumber: BPS(2023)

Tabel 2 menunjukan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018-2022 selalu setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali hanya di kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 251.919 jiwa, akan tetapi pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan kembali. Menurut Nelson dan Leibstein, pertambahan penduduk yang cepat di negara-negara berkembang memiliki dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan serta jumlah penduduk miskin meningkat (Sukirno, 2006). Adapun, peneliti menemukan keunikan di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 dimana jumlah penduduk meningkat tetapi persentase penduduk miskin mengalami penurunan yakni di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak Dan Kota Singkawang. Adapun disisi lain pada Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 mengalami jumlah penduduk meningkat dan persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk akan

menghasilkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Namun, jika pertumbuhan angkatan kerja tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Tingginya angka pengangguran pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula risiko kemiskinan yang terjadi. (Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A., 2020).

Kemudian faktor lain yang turut memengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena orang yang berpendidikan dapat mengatasi kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu metode penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan yang berguna dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai bentuk investasi dalam pembangunan, yang manfaatnya dapat dirasakan di masa depan.

Dalam penelitian ini, pendidikan diukur dengan menggunakan rata-rata lama sekolah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas penduduk yang berdasarkan pada tingkat pendidikan formal yang telah terselesaikan. Seseorang yang memiliki pendidikan semakin tinggi, maka juga akan meningkat pengetahuan dan keterampilannya, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas individu tersebut (Hasanah, et al., 2021).

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (tahun)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	6,68	6,70	6,71	6,72	6,74
Bengkayang	6,27	6,53	6,76	6,80	7,00
Landak	7,09	7,10	7,11	7,12	7,15
Mempawah	6,63	6,82	7,03	7,04	7,17
Sanggau	6,94	6,95	7,15	7,39	7,41
Ketapang	7,04	7,26	7,31	7,46	7,48
Sintang	6,73	6,89	7,07	7,08	7,36
Kapuas Hulu	7,25	7,47	7,52	7,53	7,59
Sekadau	6,58	6,60	6,83	6,85	7,12
Melawi	6,66	6,67	6,76	6,91	7,18
Kayong Utara	5,86	6,00	6,01	6,02	6,21
Kubu Raya	6,81	6,82	6,83	7,00	7,02
Kota Pontianak	9,90	10,14	10,17	10,43	10,44
Kota Singkawang	7,57	7,72	7,89	7,90	8,19

Sumber: BPS (2023)

Tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah paling tinggi pada tahun 2022 yaitu pada kota Pontianak sebesar 10,44 tahun, sedangkan yang paling rendah yaitu pada kabupaten Kayong Utara sebesar 6,21 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam akses pendidikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Menurut Todaro (2000), semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, semakin cepat pula peningkatan penghasilan yang dapat diperoleh, artinya dengan meningkatnya penghasilan, tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat berkurang. Adapun, peneliti menemukan keunikan di Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Kota Singkawang pada tahun 2021 dimana rata-rata lama sekolah meningkat, namun persentase penduduk miskin juga meningkat. Setelah itu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 pada Kabupaten Mempawah mengalami hal serupa yaitu dimana rata-rata lama sekolah dan persententase penduduk miskin juga meningkat.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan ialah alokasi anggaran yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program, layanan dan infrastruktur kesehatan guna meningkatkan kualitas masyarakat. Investasi dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian dan meningkatkan produktivitas individu. Masyarakat yang lebih sehat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan, yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Tabel 4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	101.856	195.004	157.285	370.465	314.458
Bengkayang	160.412	209.895	212.867	144.821	207.401
Landak	206.895	168.917	260.963	241.463	280.205
Mempawah	143.145	178.017	233.996	233.997	250.225
Sanggau	243.888	261.199	263.997	309.681	266.347
Ketapang	198.924	360.543	401.519	424.665	359.818
Sintang	313.084	333.987	411.388	414.115	331.920
Kapuas Hulu	259.921	289.889	355.306	324.759	213.241
Sekadau	110.304	115.159	157.488	155.420	172.119
Melawi	107.798	150.086	118.283	192.303	121.793
Kayong Utara	88.945	115.070	128.663	187.324	128.340
Kubu Raya	176.182	179.961	180.990	200.164	201.342
Kota Pontianak	248.837	266.281	325.280	359.690	337.847
Kota Singkawang	187.627	236.907	231.296	251.478	237.644

Sumber: DJPK (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Adapun pengeluaran pemerintah paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 359.818 juta rupiah pada Kabupaten Ketapang, dan yang paling rendah yaitu pada Kabupaten Melawi sebesar 121.793 juta rupiah pada tahun 2022. Terjadinya fluktuasi disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan porsi anggaran yang berbeda-beda di setiap wilayah. Menurut Bastian dalam Palenewen (2018) Semakin besar alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan maka akan semakin efektif dalam mengurangi kemiskinan, yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah terhadap bidang kesehatan dapat memacu kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun, peneliti menemukan keunikan di Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sintang dan Kota Singkawang pada tahun 2021 dimana pengeluaran

pemerintah bidang kesehatan meningkat namun persentase penduduk miskin juga meningkat. Setelah itu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 pada Kabupaten Mempawah mengalami hal serupa yaitu dimana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat tetapi persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan penting untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kesehatan. dengan menyediakan layanan kesehatan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Triani, M. 2024).

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan tersebut, didapati bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018-2022 menunjukkan tingkat kemiskinan yang cenderung menurun akan tetapi ada tahun dimana tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Kenyataan yang ada dari variabel Jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang menyebabkan kemiskinan terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang ada, dimana pada variabel jumlah penduduk ada beberapa Kabupaten/Kota meningkat justru tingkat kemiskinan menjadi menurun. Selanjutnya pada variabel rata-rata lama sekolah ada beberapa Kabupaten/Kota dimana rata-rata lama sekolah meningkat namun kemiskinan juga ikut meningkat. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ada beberapa Kabupaten/Kota dimana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat namun kemiskinan juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat".